

SKRIPSI

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI TANJUNG BAYANG DI KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI TANJUNG BAYANG DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S. Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

PUTRI WIDYANINGSIH

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1123 017

08/09/2021
-
1 exp
-
smb-Alumni
-
R/0160/ADM/21CD
-
WID
-
PI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan
Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota
Makassar
Nama Mahasiswa : Putri Widyaningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 105611123017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si
NIDN: 0903046202



Syukri, S.Sos, M.Si
NBM: 923568

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0205/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 30 bulan Agustus tahun 2021

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

4. Syukri, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Widyaningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 105611123017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Putri Widyaningsih

ABSTRAK

Putri Widyarningsih, Jaelan Usman, Syukri. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 8 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian data penelitian ini dikumpul melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar sebagai motivator di Pantai Tanjung Bayang optimal dari beberapa hasil wawancara dilapangan yang didapatkan, maupun sebagai fasilitator Pemerintah Dinas Pariwisata belum cukup baik dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Bayang karena tidak memberikan sumbangsih seperti yang diharapkan pengelola Pantai Tanjung Bayang hanya menjanjikan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik dan Dinas Pariwisata sebagai dinamisator di Pantai Tanjung Bayang juga belum cukup baik karena selama beberapa tahun Pantai Tanjung Bayang hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat setempat dengan menggunakan biaya retribusi masuk untuk melakukan perbaikan dan pembangunan di dalam tempat wisata tersebut. Dinas Pariwisata harus lebih memperhatikan tempat wisata Pantai Tanjung Bayang agar mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan harus bisa menjadi motivator yang baik dalam pengelolaan pantai agar pantai teratur dengan baik.

Kata Kunci : *pemerintah, pariwisata*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si dan Bapak Syukri, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh Staff Pegawai di ruang lingkup Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Yanuar Pribadi dan Ibu Rakhma Nikma Syarief yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
7. Saudara(i) penulis Yanie Wulandari dan Andhika Wirawan yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan.
8. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendokan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Segenap Pemerintah Kota Makassar terkhususnya Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar dan seluruh informan yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan arahan kepala penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Teman sekaligus partner saya Fathur Hari Nugraha, Nurfauziah, Andi Nurfaisah, Yunitasari, Celia Amanda, Atira Dzulhijjah Alonza, Najla Irbah, Nurkhaeratih, Reztu Saleh, Nanda Isra Noviyanti, Fitri Putri Pangestu, Nabila Fitrianita, Sitti Rahma, Siti Nazmia Awalia, Sri Megawati AM Nur yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Saudara(i) seperjuangan di Kelas F Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang senantiasa bekerja sama, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017 Renaisans Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

13. Serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga karya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada semua pihak. Tidak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tidak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah SWT, demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Makassar, 20 Juni 2021

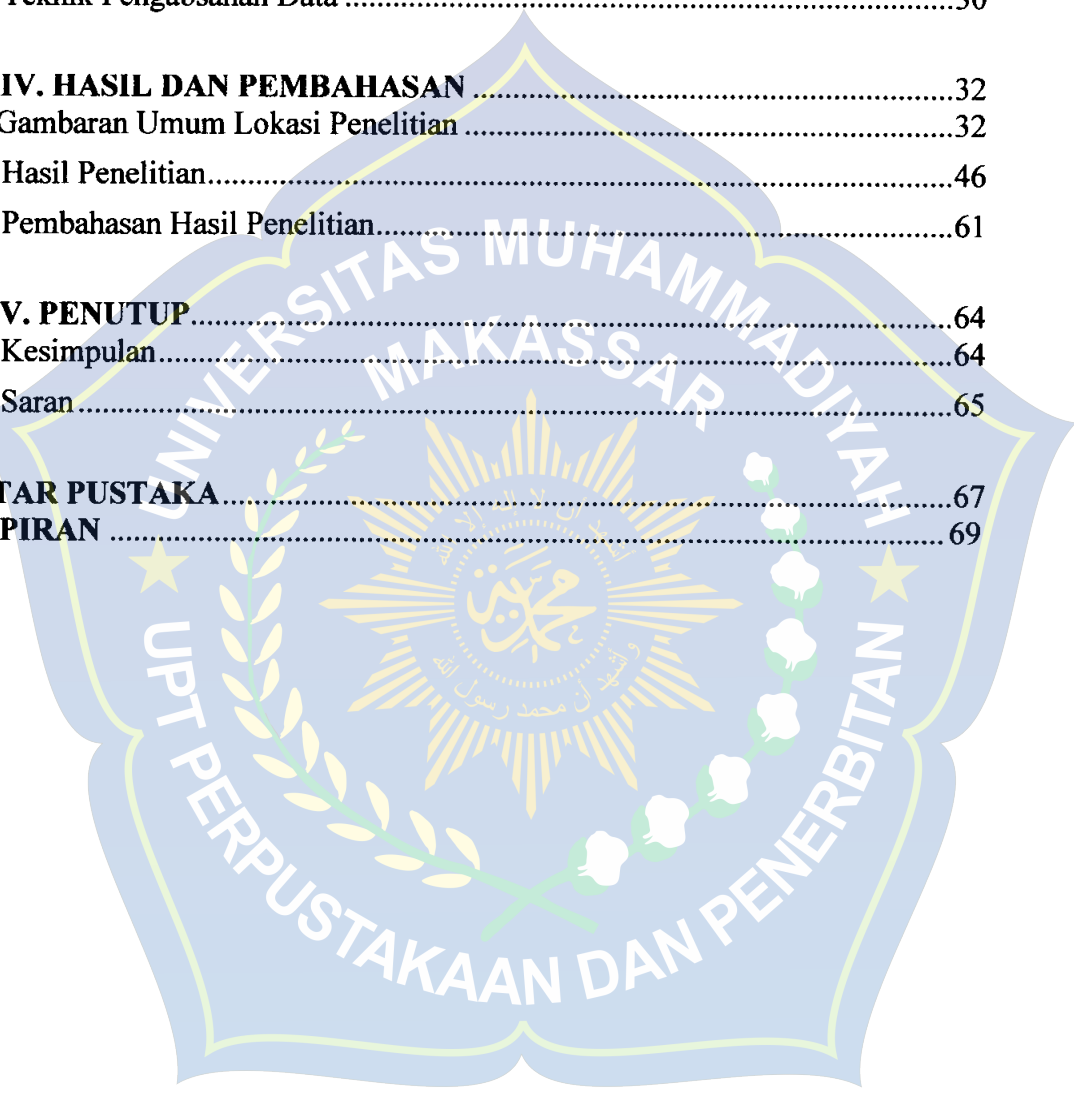

Putri Widyarningsih



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori Peran Pemerintah.....	9
C. Pariwisata.....	11
D. Pengembangan Pariwisata.....	13
E. Motivator.....	16
F. Fasilitator.....	19
G. Dinamisator.....	21
H. Kerangka Pikir.....	23
I. Fokus Penelitian.....	24
J. Deskripsi Fokus.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan.....	26

D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Teknik Pengabsahan Data	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	27
Tabel 4.1 Penduduk Kota Makassar	34
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Makassar	35
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan	45
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pelatihan	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata	44
Gambar 4.2 Data Pemasukan Tanjung Bayang	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak Pulau Sulawesi. Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia Timur dengan luas wilayah seluas 175,77 km² berada pada urutan kelima kota terbesar di Indonesia. Kota Makassar memiliki etnik dan kultur yang banyak dengan beragam suku bangsa seperti Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan lain lain dan jumlah penduduk kota Makassar diperkirakan lebih dari 1,5 juta jiwa

. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Makassar adalah pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Salah satu faktor pendukung dalam pertumbuhan kota adalah pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu yang paling penting dalam memperbaiki ekonomi kota. Pariwisata menjadi bagian penting dalam melakukan revitalisasi kota saat ini. Pariwisata adalah salah satu industri terbesar dan menunjukkan dengan pertumbuhan yang konsisten tiap tahunnya. Pengembangan objek wisata harus terus dilakukan dengan pertimbangan bahwa tempat wisata butuh perubahan agar wisatawan tidak cepat merasa bosan dengan pemandangan yang biasa saja. Bangkitnya pariwisata pada suatu kota dapat menjadi daya tarik tersendiri pada kota tersebut dan menjadi sasaran kunjungan masyarakat dan berbagai tujuan proyek baru.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah menjelaskan mengenai pariwisata pada pasal 1 ayat 3 bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”. Selain itu, dalam pasal 23 ayat 1c telah memaparkan dengan jelas bahwa kewajiban pemerintah adalah “memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”.

Kota Makassar memiliki banyak tempat wisata untuk keperluan hiburan bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Keberhasilan pariwisata di Kota Makassar, merupakan salah satu hasil dari usaha Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar yang memiliki fungsi sebagai koordinator dari beberapa kepariwisataan demi mewujudkan pariwisata yang efektif dengan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan cara mempromosikannya.

Beberapa tempat wisata yang paling digemari masyarakat Makassar yaitu Anjungan Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pulau Khayangan, Pulau Samalona, Benteng Rotterdam, Kawasan Lego-Lego, Pantai Tanjung Bayang dan lain-lainnya. Namun, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Pantai Tanjung Bayang. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas di Pantai Tanjung Bayang dan kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat setempat yang dapat dilihat dari tidak tertatanya dengan baik objek wisata tersebut.

Salah satu pandangan dari Pj Walikota Makassar, M. Iqbal Samad Suhaeb, selaku perwakilan pemerintah Kota Makassar mengatakan bahwa jika kondisi Pantai Tanjung Bayang kini cukup baik, hanya saja memang belum tertata dengan baik sehingga terlihat semerawut seperti letak bangunan-bangunan yang ada disekitar Pantai Tanjung Bayang. Sehingga dinilai Pantai Tanjung Bayang belum optimal untuk menjadi tempat wisata. Objek wisata tersebut tampaknya tidak punya sarana prasarana dan kurang nyaman untuk dikunjungi. M. Iqbal Samad Suhaeb menegaskan bila ada pihak swasta yang ingin berinvestasi, maka dipersilahkan tentunya dengan berbagai syarat. (Terkini.id, 2019)

Berdasarkan pernyataan dari M. Iqbal Samad Suhaeb tersebut memperlihatkan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata untuk mengelola Pantai Tanjung Bayang. Rudy Djamaluddin selaku Pj Wali Kota Makassar berpendapat, pada tahun 2021 telah ada program penataan kawasan Tanjung Bayang. Namun untuk besaran alokasinya masih belum terperinci. Pengembangan Pantai Tanjung Bayang membutuhkan anggaran yang bersumber dari Pusat ataupun dana hibah atau sumber dana lainnya seperti dana insentif daerah (DID). (Sindonews, 2020)

Team leader Yayasan Konservasi Laut (YKL), Muhammad Fauzi menyampaikan dalam kegiatan gerakan bersama bersih pantai dan laut di Pantai Tanjung Bayang pada Minggu, 15 Maret 2020, bahwa peserta kegiatan tersebut telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1436, 12 kg sampah pada beberapa pantai salah satunya Tanjung Bayang. Dari hasil tersebut, tercatat sampah yang paling banyak ditemukan ialah sampah berbahan plastik sekali pakai. Sampah jenis ini

merupakan sampah yang sangat berbahaya bagi ekosistem laut dimana sampah ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa kenyataan yang terjadi di Pantai Tanjung Bayang berbanding terbalik dengan kewajiban pemerintah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1c. Dimana seharusnya pemerintah mampu memelihara, mengembangkan, dan melestarikan objek wisata yang dimiliki. Namun, yang terlihat belum adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pengelola/petugas tempat wisata maupun masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthia Misdrinaya yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Kota Makassar” dari penelitian tersebut peneliti ingin tahu bagaimana strategi pemasaran dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar, dari penelitian di atas dan beberapa penelitian lainnya belum ada yang meneliti tentang “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Di Kota Makassar” maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari beberapa masalah yang penulis dapatkan maka rumusan masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai motivator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar?

3. Bagaimana peran Dinas Pariwisata sebagai dinamisor dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata sebagai motivator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata sebagai dinamisor dalam mengembangkan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi daya tarik untuk masyarakat terhadap objek wisata di Kota Makassar.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi peneliti dapat memberikan pemahaman terhadap peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dasar ketika melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang sinkron dengan objek penelitian ini yaitu:

1. Misdrinaya (2017)

Dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Kota Makassar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam komunikasi pemasaran tempat pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut menitik beratkan pada strategi komunikasi pemasaran dinas hasil dari skripsi tersebut menitik beratkan pada strategi komunikasi pemasaran dinas pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar, tentunya pelaksanaan pembangunan destinasi pariwisata harus memiliki daya saing yang unggul sehingga mampu mengembalikan citra kota makassar sebagai bandar dunia yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan nusantara melalui penyediaan dan pengembangan aksesibilitas, atraksi wisata, dan

sarana prasarana penunjang kegiatan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelas internasional. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Hamel et al (2017)

Dengan judul Peranan Dinas Kebudayaan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangehe, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas kebudayaan pengembangan objek wisata di Kabupaten kepulauan sangehe, adapun hasil yang didapatkan peneliti mengharapkan pemerintah daerah dapat menambah objek wisata andalan yang bisa dikenal banyak orang selain objek wisata pantai lakban di kabupaten kepulauan sangehe karena di kepulauan tersebut masih kurangnya destinasi pariwisata. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Amalyah et al (2016)

Dengan judul Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pariwisata dalam mengembangkan pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari, adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut yaitu peran stakeholder sangat penting dalam pengembangan pariwisata di pulau samalona karena pulau samalona sebagai wisata bahari yang perlu dilestarikan dan dikembangkan akan tetapi pengembangan wisata di pulau samalona belum maksimal dilihat dari sarana prasarana yang belum cukup memadai. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian terdahulu yang di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti tetapi sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

B. Konsep dan Teori Peran Pemerintah

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi hal yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam satu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah sesuatu hal yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan. Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Sehingga peran mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Peran pemerintah sangat menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga dapat mencakupi seluruh aspek kebutuhan sosial dalam masyarakat. W.S Sayre dalam Akbar et al (2021) pemerintah sebagai organisasi resmi negara yang menjalankan kekuasaannya. Sementara menurut C.F Strong dalam Akbar et al (2021) pemerintah adalah seseorang yang diberikan hak dalam melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi di dalam dan diluar negara, yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol.

Peranan merupakan suatu aspek dari kedudukan atas status karena peranan adalah dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif untuk melakukan suatu fungsi. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam Erfan Hartono, Dian Prima Safitri (2019) “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang, atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi lebih tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat di dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Ciri-ciri peran yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan suatu rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

Hal-hal penting yang terkait dengan peranan:

1. Bahwa peranan-peranan harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

C. Pariwisata

Pariwisata salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kawasan pariwisata di Indonesia begitu mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, keamanan, tata kelola yang baik agar dapat menciptakan kawasan pariwisata yang diminati pengunjung wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pariwisata merupakan salah satu bagian dari sektor industri di Indonesia yang memiliki suatu potensi dan peluang untuk dikembangkan. Sunaryo dalam buku Bachruddin Saleh Luturlean et al (2019)

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dalam jangka waktu tertentu dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk berlibur atau urusan bisnis sehingga kepentingannya dapat terpenuhi.

Menurut Yoeti dalam Rusdi (2017) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu yang sementara, dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan berusaha mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.

Menurut Meis dalam tri yuliani (2018) pariwisata adalah sesuatu yang perlu dipahami untuk dianalisis dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Namun hampir di semua Negara tidak memahami hal ini sehingga timbul berbagai permasalahan yang menyulitkan industri untuk berkembang secara realitas yang berkaitan dengan informasi pariwisata yang mendasar, dalam memprediksi kontribusinya baik untuk regional, nasional dan perekonomian global.

Definisi pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu definisi pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan, definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri atau bisnis, sedangkan kategori ketiga memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya. Dari ketiga definisi tersebut kesimpulannya bahwa hadirnya industri dan bisnis ini muncul untuk bagaimana sebuah wilayah dapat menaikkan sektor ekonomi disebuah daerah yang tidak dapat melupakan sebuah sosial budaya dari daerah.

Smith dalam buku Wijayanti (2019) mengungkapkan pariwisata edukasi berperan sebagai sarana peningkatan standar akademik sehingga program wisata studi menjadi agenda rutin dan bagian dari kurikulum di sekolah atau merupakan kegiatan ekstrakurikuler.

D. Pengembangan Pariwisata

Menurut Sugiono dalam Manahati Zebua (2016), kata pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Mengembangkan adalah menjadikan besar, atau memperluas. Pengembangan pariwisata harus direncanakan dengan hati-hati agar dampak yang muncul dapat dikontrol. Di dalam perencanaannya perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh disetiap daerah maupun kota yang memiliki objek dan daya tarik unggul, berpotensi untuk dikembangkan, dan rintisan untuk dijadikan objek dan daya tarik wisata. Betapa pentingnya respon pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Sunaryo dalam Amalyah et al (2016) pembangunan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh seseorang secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau diinginkan. Menurut Suwantoro dalam Amalyah et al (2016) unsur pokok yang harus mendapat perhatian untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya mencakup lima unsur yaitu:

- a. Objek dan daya tarik wisata
- b. Prasarana wisata
- c. Sarana wisata
- d. Tata laksana/infrastruktur
- e. Masyarakat/lingkungan

Sektor pariwisata sangat diperlukan strategi dalam pengembangan kepariwisataan yang terencana atau teratur agar kekuatan yang dimiliki bisa dikembangkan secara efektif. Dalam hal meningkatkan sektor pariwisata pemerintah sebagai pelaksana yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengembangkan pariwisata.

Terkait dengan pembangunan pariwisata, Paturusi dalam Ariwangsa & Pujani (2015) menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan. Di samping itu, mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi wisatawan, industri pariwisata (investor), pemerintah dan masyarakat lokal di mana daerah tujuan wisata tersebut berada. Mill dalam Wijayanti (2019) menyatakan bahwa pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir permasalahan.

Menurut Butler dalam Wijayanti (2019), ada enam tahap pengembangan pariwisata yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda secara teoritis, yaitu seperti di bawah ini:

a. Tahap eksplorasi, pertumbuhan spontan dan penjajakan (*exploration*).

Pada tahap ini jumlah wisatawan relatif kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Fasilitas pariwisata dan kemudahan yang didapat wisatawan juga kurang baik. Suatu atraksi di daerah wisata belum

berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal relatif tinggi.

b. Tahap keterlibatan (*involvement*)

Pada tahap ini mulai adanya inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisata, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu oleh keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

c. Tahap pengembangan dan pembangunan (*development*)

Pada tahap ini, wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan biasanya memiliki jumlah yang sama, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan memperbaiki fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah kerusakan fasilitas mulai terjadi.

d. Tahap konsolidasi

Pada tahap ini tingkat pertumbuhan mulai menurun walaupun total jumlah wisatawan masih cenderung meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli yang sangat kuat.

e. Tahap kestabilan

Pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang berada pada puncaknya. Artinya, wisatawan tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan wisata. Hal ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan

bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung.

f. Tahap penurunan kualitas

Pada tahap *decline*, pengunjung kehilangan daerah tujuan wisata yang diketahui awalnya dan menjadi “resort” baru. *Resort* menjadi bergantung pada sebuah daerah secara geografi lebih kecil untuk perjalanan harian dan kunjungan berakhir pekan. Kepemilikan berpeluang kuat untuk berubah dan fasilitas-fasilitas pariwisata, seperti akomodasi akan berubah manfaatnya.

E. Motivator

Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) Motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain. Motivasi juga merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan dalam memutuskan untuk memilih tujuan wisata yang akan dikunjungi. Dengan adanya motivasi menyebabkan orang bertindak untuk melakukan kunjungan wisata, seperti termotivasi kenyamanan dan keindahan yang ditawarkan oleh panorama pantai tersebut.

1. Motivasi ekstrinsik menurut Permana dalam Maulana et al (2015) Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, yang kemudian mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi kerja pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik.

2. Hasibuan dalam Maulana et al (2015) motivasi intrinsik mengemukakan bahwa faktor-faktor dari motivasi intrinsik yaitu tanggung jawab, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, pengembangan dan kemajuan.

Menurut Yoon dan Usal dalam Dewi et al (2017) ada dua faktor penting yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan berwisata, yaitu:

1. Faktor Pendorong (*push factors*), faktor yang mendorong seseorang untuk berwisata adalah ingin terlepas (meskipun hanya sesaat) dari kehidupan yang rutin setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu lintas dan hiruk pikuk kesibukan kota.
2. Faktor Penarik (*pull factors*), faktor ini berkaitan dengan adanya suatu atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan wisata. Atraksi wisata ini dapat berupa kemashuran akan objek, tempat-tempat yang banyak dibicarakan orang, serta sedang menjadi berita. Dorongan berkunjung ke tempat teman atau keluarga atau ingin menyaksikan atraksi kesenian serta pertandingan olahraga yang sedang berlangsung juga menjadi daya tarik di daerah tujuan wisata.

Indikator motivasi berdasarkan objeknya Suwena dalam Rani (2020), yaitu:

1. *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan suatu perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
2. *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan

suatu penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.

3. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan suatu perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan suatu perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan suatu perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
6. *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, piknik, dan lain-lain.
7. *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau dapat menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji, umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
8. *Marine tourism* merupakan suatu kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan

olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

F. Fasilitator

Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019), Fasilitator adalah pengembangan potensi pariwisata yang dimana peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak sekedar menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata.

Osborn dan Gaebler dalam buku Amin (2019) mengemukakan bahwa peran pemerintah daerah lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi penunjang sarana dan prasarana, selain itu juga memfasilitasi promosi obyek wisata, sampai dengan pemeliharaan objek wisata atau destinasi wisata.

Pitana dan Gayatri dalam Welembuntu Herman (2021) Fasilitator adalah beberapa orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju, dan menyediakan segala fasilitas yang mendukung bentuk program.

Penyediaan sarana dan prasarana menyerahkan penuh kepada pelaku objek wisata atau destinasi wisata, pemerintah hanya memberikan atau membantu sejumlah dana atau anggaran dalam pengembangan objek wisata dan desa wisata jika ada yang mengajukan dan meminta untuk dikembangkan melalui surat, whatsapp, telepon maupun datang langsung.

Kusno dalam buku Hadiutomo (2021) mengemukakan bahwa sebagai fasilitator pemerintah berperan agar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang berjalan mampu mendayagunakan seluruh potensi nasional. Fasilitasi pemerintah tersebut antara lain dalam bentuk intervensi melalui program dan kegiatan yang dibiayai pemerintah dalam penyediaan barang dan layanan publik.

Namun juga dalam pemberian bantuan tersebut harus memenuhi kriteria yang ada seperti memiliki potensi yang dapat dijual dan dikembangkan, didukung oleh *stakeholder*, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kelembagaan yang ada di desa. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh masyarakat melalui dana dari pemerintah adalah kamar mandi, mushola, tempat sampah, penyediaan bangunan tidak permanen untuk berwirausaha, tempat parkir, perbaikan akses jalan menuju objek wisata dan berbagai pendukung-pendukung pariwisata lainnya.

Hanya sangat disayangkan bahwa fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun tadi tidak dikelola dengan baik, sehingga ada begitu banyak fasilitas yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya dana yang sudah begitu banyak dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas menjadi sia-sia

akibat dari pengelolaan dan perawatan yang kurang baik. Sebagai fasilitator yang bertanggung jawab menyediakan semua fasilitas dasar bagi wisatawan, pemerintah sudah cukup baik. Hanya saja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dibarengi dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik. Sehingga dengan fasilitas-fasilitas yang tidak terawat itu, bukannya menambah rasa nyaman para wisatawan, tapi justru membuat keasrian alam tersebut menjadi terlihat kumuh dengan bangunan-bangunan yang tidak terawat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap pembangunan destinasi wisata haruslah berlandaskan pada pendekatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka tidak ada jalan lain untuk mencapai tujuan itu selain membangun industri pariwisata yang melibatkan masyarakat di dalamnya.

G. Dinamisator

Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus mampu bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran yang penting untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Kusno dalam buku Hadiutomo (2021) mengemukakan bahwa sebagai dinamisator, pemerintah berperan menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif dan dinamis agar seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam program dan kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatif.

Menurut Suparjan dalam buku O. R. Dewi (2018) peran pemerintah sebagai dinamisor adalah memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan.

Sebagai upaya dinamisasi antar *stakeholder* pengembang pariwisata pemerintah selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Kerjasama dengan berbagai sektor swasta yaitu:

1. Swasta

Kerja sama dengan pihak swasta merupakan hal yang penting dilakukan untuk pengembangan objek wisata karena sebagai penunjang dalam kegiatan berpariwisata wisatawan, untuk pemerintah akan menguntungkan dari segi meningkatnya pendapatan asli daerah dan untuk pihak swasta akan memberikan peningkatan dalam pendapatan bisnis mereka. Kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan objek wisata dengan pihak swasta adalah dengan menggandeng restoran, hotel, maupaun biro perjalanan. Sehingga orang yang berwisata di daerah setempat dapat merasakan kenyamanan selama berwisata. Selain itu juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA). Dalam pengembangan pariwisata harus mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya akan bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata, Hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu para

wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang disediakan oleh pihak hotel termasuk juga sarana akomodasi lain seperti restaurant dan biro perjalanan.

2. Organisasi Pemerintah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjalin kerja sama dengan berbagai dinas terkait untuk penunjang perkembangan pariwisata contohnya terkait dengan akses jalan menuju tempat wisata dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam perjalanan wisata tentu membutuhkan oleh-oleh sebagai cendramata untuk kerabat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk berkoordinasi mengunjungi UMKM, Bappeda, DPMPTSP.

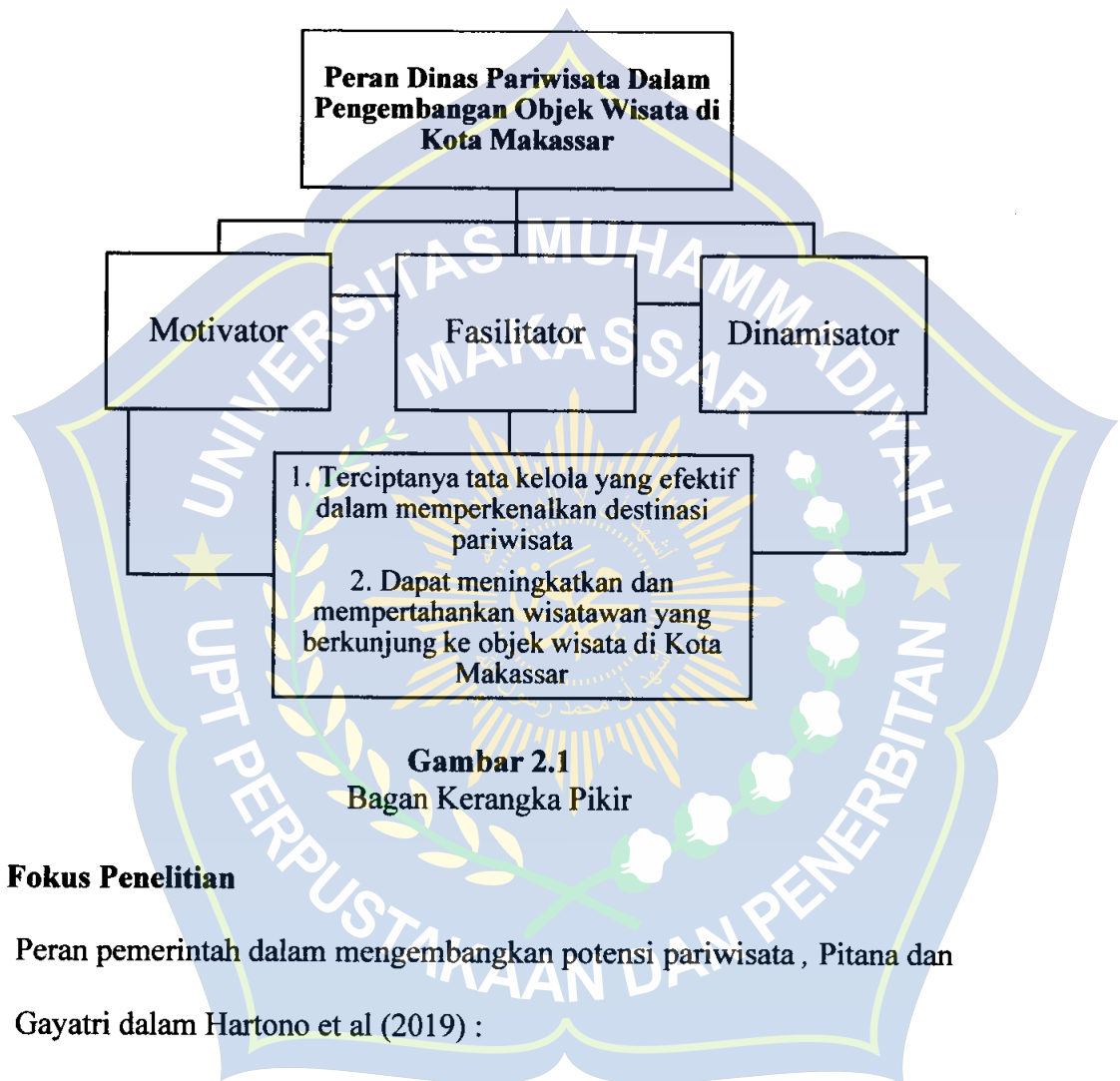
3. Masyarakat

Kerja sama pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat adalah masyarakat menyediakan usaha sendiri seperti *homestay* dan tugas dinas disini adalah memberikan informasi terkait dengan *homestay* yang ada di objek wisata sehingga wisatawan tidak khawatir dengan jarak yang ditempuh untuk menginap dan berwisata dengan hal tersebut juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

H. Kerangka Pikir

Penelitian dengan judul “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar” ini berpedoman pada

teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) tentang peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

I. Fokus Penelitian

Peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata, Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) :

1. Motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain.
2. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan dan membantu membuat rencana agar tercapai sesuai tujuan.

3. Dinamisator adalah yang menjadikan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak.

J. Deskripsi Fokus

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

1. Motivator, peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
3. Dinamisator, agar pembangunan berlangsung secara ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bekerja sama yang baik. Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar dapat tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2021. Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar, di Jl Urip Sumoharjo Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti masalah “Peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata di Kota Makassar” Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam buku (Sugiyono, 2019) , menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Informan

Berpedoman pada buku Sugiyono (2019) Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan informan masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Informan adalah seseorang yang akan memberikan informasi tentang masalah yang

akan diteliti oleh penulis sehingga dapat membantu memudahkan peneliti dalam mencari data yang spesifik.

Berikut informan yang akan terlibat dalam penelitian Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Safaruddin S.S	S	Kasubid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata
2	Khairil Amri	KA	Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata
3	Abd Rahman Tayang	AR	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4	Muh Jufri DM	MJ	Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5	Irwan Tutu	IT	Petugas Pos Tanjung Bayang
6	Dg Tarru	DT	Pos Keamanan
7	Nur Annisa	NA	Masyarakat
8	Ayulia Afisa	AA	Masyarakat

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh adalah:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara. Dimana ada data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil tambahan dari hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki pembahasan yang sesuai dengan

subjek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan tentang masalah yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang menggabungkan antara wawancara terstruktur sebagai bahan dasar yang akan ditanyakan kepada informan, dan menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

2. Observasi

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini tidak hanya terbatas pada komunikasi dengan orang saja, namun juga melakukan observasi pada obyek-obyek alam lainnya. Bahwa dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi berpartisipatif (*participant observation*). Dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati sambil melakukan penelitian dan pengamatan. Adapun

dalam segi instrumentasi, penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis.

3. Studi dokumentasi

Bahwa untuk menyempurnakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya. Dimana studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkap penelitian, berupa data, sumber tertulis, gambar, yang dimana dapat memberikan informasi dalam proses penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah menjadi sebuah informasi yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh akan mudah untuk dipahami dan dapat diambil sebuah kesimpulan. Dalam melakukan pengelolaan data menjadi informasi, peneliti menggunakan metode analisis data yang mengacu pada Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yang berbagi dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang didapatkan dari proses wawancara, selanjutnya peneliti memilah data yang dikumpulkan. Setelah itu peneliti melakukan pengkodean data menggunakan simbol yang sesuai dengan informan dan waktu dilakukannya wawancara, untuk

memperoleh peneliti dalam mencari data yang nantinya akan disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (*display data*)

Setelah data dipilih maka peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Setelah data disajikan maka penelitian melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan data yang ditemukan. Setelah data diverifikasi berdasarkan bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi saat dilakukan penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam buku Sugiyono (2019) kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Makassar

a. Keadaan Geografi dan Batas Wilayah Kota Makassar

Makassar saat ini menjadi kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan beberapa Tahun belakangan pada masa itu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Terhitung sampai saat ini Kota Makassar memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa dan berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Pada saat ini Kota Makassar memiliki etnik budaya dan kultur serta adat istiadat dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang jumlahnya adalah Suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Makassar juga memiliki beberapa tempat wisata pantai yang sangat digemari oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga seperti Pantai Akkarena, Pulau Lae-Lae, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pantai Tanjung Bayang. Namun yang menjadi fokus utama adalah Pantai Tanjung

Bayang, karena pantai tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat selain lokasinya mudah dijangkau disana juga memiliki banyak penginapan (*villa*) yang harganya cukup terjangkau.

Pantai Tanjung Bayang beralamat di Jalan Selat Tanjung Merdeka, Tanjung Bayang salah satu wisata bahari yang berdekatan dengan pantai Akkarena, pantai berpasir yang menjadi tujuan favorit masyarakat saat akhir pekan. Sejarah pemberian nama Tanjung Bayang ini adalah karena di dekat pantai ini terdapat danau yang bernama Tanjung Bayang. Karena pantai dekat dengan danau ini selalu ramai di akhir minggu. Sehingga para pengunjung yang rutin berkunjung ke pantai tersebut memberikan nama yang sama dengan danau di dekatnya.

Selain aman dan indah, berkunjung ke pantai Tanjung Bayang hanya membutuhkan biaya yang murah untuk masuk ke pantai tersebut yaitu lima ribu rupiah untuk motor dan untuk mobil membutuhkan sepuluh ribu rupiah.

b. Keadaan Iklim

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim

sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

c. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dalam Kota Makassar Dalam Angka 2021, hasil sensus penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 1.423,877 jiwa penduduk di Kota Makassar. Kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,60 persen jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar tahun 2020

Tamalanrea	103.177,00
Biringkanaya	209.048,00
Manggala	146.724,00
Panakukang	139.590,00
Tallo	144.977,00
Kep. Sangkarrang	14.125,00
Ujung Tanah	35.789,00
Bontolala	54.996,00
Wajo	29.972,00
Ujung Pandang	24.526,00
Makassar	82.067,00
Rappocini	144.587,00
Tamalate	180.824,00
Mamajang	56.049,00
Mariso	57.426,00

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 mencapai angka 228,231 jiwa/km². Adapun kepadatan penduduk pada 15 kecamatan di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar

tahun 2020

Tamalanrea	3.240
Biringkanaya	4.335
Manggala	6.078
Panakukang	8.187
Tallo	24.867
Kep. Sangkarrang	9.172
Ujung Tanah	8.134
Bontoala	26.189
Wajo	15.061
Ujung Pandang	9.325
Makassar	32.566
Rappocini	15.665
Tamalate	8.947
Mamajang	24.911
Mariso	31.553

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar tersebut menunjukkan bahwa kepadatan jumlah penduduk di Kota Makassar sangat beragam diberbagai kecamatan. Dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Makaasar dengan jumlah penduduk sebanyak 32,566 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah penduduk sebanyak 3,240 jiwa/km².

2. Profil Dinas Pariwisata

a. Visi dan Misi Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar

1) Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawah dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif, serta produktif. Dinas Pariwisata Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar, merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki otoritas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah Kota Makassar, yaitu :
“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ & Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”

2) Misi

Berusaha untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tersebut maka diaturlah misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2022-2026 sebagai berikut:

- a) Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju sdm kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;

- b) Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
- c) Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere” dan “Smart City” untuk semua.

b. Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar memiliki fungsi jabatan struktural sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- b) Membangkitkan Daya Tarik Wisata, Pada Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
- c) Menetapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

- d) Melakukan pemasaran pariwisata;
- e) Menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- f) Mewujudkan pencapaian untuk sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

2) Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat memiliki tanggung jawab seperti koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan, menyelenggarakan fungsi;

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian Perencanaan dan Pelaporan, dimasing-masing subbidang terkait dan Kepegawaian;
- d) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) sekretariat;
- e) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Sekretariat;
- f) Mengkoordinasikan setiap bidang dalam Penyusunan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA), Perjanjian Kinerja

(PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;

- g) Mengordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h) Mengordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- i) Mengordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j) Mengordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l) Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk menjalankan tugas;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- n) Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas;
- o) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengavaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

3) Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah untuk penguatan kualitas kepariwisataan serta meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi maupun komersialisasi produk/ karya kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan iptek;
- b) Menyediakan prasarana zona/ruang/kota kreatif sebagai media bereksprei, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- c) Melaksanakan pengembangan, penelitian ekonomi kreatif untuk meningkatkan dan menciptakan kualitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru;
- d) Melaksanakan pembinaan, perlindungan, pemberian penghargaan/ apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif;

- e) Melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan event-event.
- f) Memfasilitasi dan kerjasama industri ekonomi kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produkis atau kegiatan lainnya.

4) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan destinasi wisata serta peningkatan daya saing industri wisata serta peningkatan daya saing industri pariwisata dan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan, pengembangan penyediaan fasilitasi pelayanan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat alam, buatan, dan industri pariwisata,;
- c) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- d) Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan daya tarik wisata dalam mencapai kemajuan destinasi pariwisata daerah juga meningkatkan kualitas dan pesaing pariwisata;
- e) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di pengembangan destinasi wisata, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi wisata;
- g) Melaksanakan administrasi pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

5) Bidang Pemasaran dan Promosi

Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, promosi pariwisata, sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- b) Melaksanakan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;
- c) Mengembangkan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri;

- d) Melaksanakan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder pariwisata lainnya;

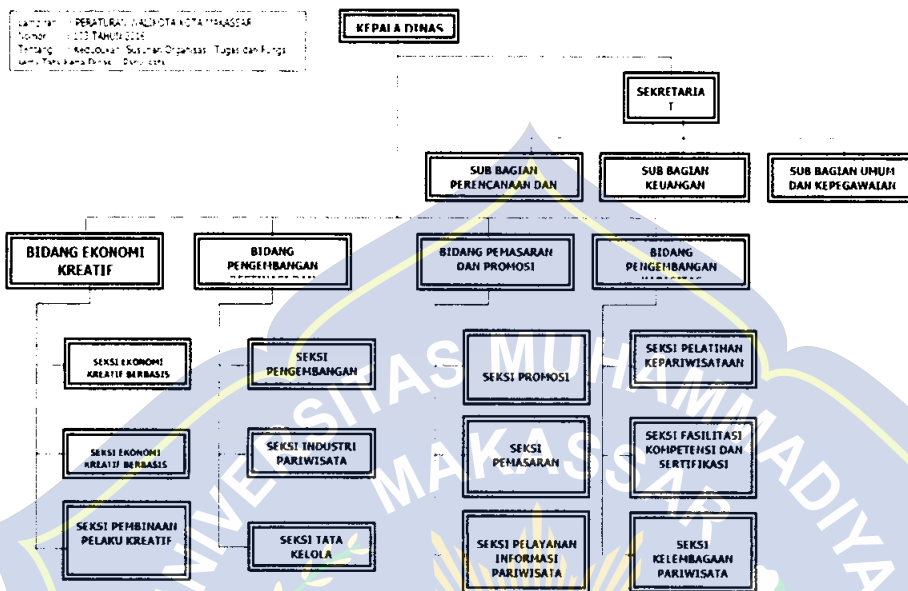
6) Bidang Pengembangan Kapasitas

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kepariwisataan terhadap sumber daya manusia pada industri pariwisata dan kelembagaan profesi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- b) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis kepariwisataan;
- c) Melaksanakan fasilitasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang fasilitasi saran uji kompetensi dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi;
- d) Mengoptimalkan peran serta lembaga pariwisata dalam pengembangan kapasitas melalui pola partisipasi dan kemitraan.

c. Struktur Organisasi

Adapun susunan atau struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini;



Gambar 4.1

Sumber: rencana strategi dinas pariwisata 2021-2026

d. Sumber Daya Kepegawaian Dinas Pariwisata

Berupaya mencapai target pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun kedepan harus didukung oleh peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas kinerja SDM Dinas Pariwisata. Sumber daya manusia adalah modal utama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, karena sumber daya ini yang menjadi penghasil ide, kreativitas dan pengetahuan untuk dikembangkan menjadi produk dan jasa yang bernilai ekonomi. Berdasarkan data 31 Desember 2013, susunan kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Makassar disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Kepangkatan

Urutan Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pembina / Golongan IV	6	6,06
Penata / Golongan III	36	36,36
Pengatur / Golongan II	19	19,19
Tenaga kontrak / honorer	38	38,39
Jumlah	99	100

Sumber: rencana strategi dinas pariwisata 2021-2026

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Master (S2)	13	13,13
Sarjana (S1)	37	37,38
Diploma (D3)	13	13,13
SLTA / SMK	36	36,36
Jumlah	99	100

Sumber: rencana strategi dinas pariwisata 2021-2026

Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pelatihan/ Penjenjangan

Tingkat Pelatihan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
PIM II	1	6,67
PIM III	2	13,33
PIM IV	12	80
Jumlah	15	100

Sumber: rencana strategi dinas pariwisata 2021-2026

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas menurut pangkat dan pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pariwisata sebagian besar cukup memadai, namun mengingat Dinas Pariwisata memiliki tugas

pokok di bidang Ekonomi Kreati, masih dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan khusus terkait pengembangan ekonomi kreatif.

e. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2022-2026 mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri atas lima program , yakni:

- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- b. Program pemasaran pariwisata
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

B. Hasil Penelitian

1. Motivator

Motivator, peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Penanam modal merupakan inti yang perlu diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan maksimal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan S selaku Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Dinas pariwisata sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota makassar adalah regulator penyusun kebijakan semua daya tarik wisata atau pariwisata itu berkembang dalam hal tanjung bayang ini memang, kami memiliki beberapa kebijakan-kebijakan sehingga tanjung bayang sehingga dapat menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan sebagai contoh kemarin ini kami telah membentuk kelompok sadar wisata dan tujuannya bagaimana masyarakat disana lebih terlibat aktif untuk membangun daya tarik wisatawan itu sendiri yang kemudian dinas pariwisata memberikan beberapa dukungan contohnya dukungan pelatihan manajemen pengelolaan daya tarik wisata tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat di sekitar tanjung bayang itu tahu bahwa dalam mengembangkan suatu daya tarik pariwisata ada hal-hal yang mesti diketahui dan dilengkapi bagaimana memperlakukan tamu-tamu yang datang disana, bagaimana menjaga kebersihan area lokasi wisata disana sehingga dapat menerapkan konsep pariwisata yang sadar wisata dan sabta pesona dan sabta pesona itu ada tujuh hal yang harus dipenuhi suatu daya tarik wisata atau objek wisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Hal inilah yang kami coba masukkan ke dalam pemahaman-pemahaman masyarakat di sekitar tanjung bayang itulah salah satu cara kamu memotivasi mereka untuk mengembangkan daya tarik wisata mereka itu sendiri (wawancara 17 juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah maksimal menjadi motivator terhadap Pantai Tanjung Bayang tersebut, karena telah membentuk kelompok dan memberi dukungan pelatihan manajemen pengelolaan daya tarik wisata agar masyarakat lebih memperhatikan poin-poin penting dalam tujuan mengembangkan tempat wisata tersebut.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan Permana dalam Maulana et al (2015) yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik (dari luar) motivasi ekstrinsik muncul dari diri seseorang, mendorong untuk menciptakan semangat dan untuk mengubah semua sikap menjadi lebih baik dan motivasi intrinsik (seseorang/kelompok) motivasi

intrinsik adalah yang ada dalam diri sendiri lalu mempengaruhi orang lain untuk menjadi yang bermanfaat.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan KA selaku Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Selama ini itu dinas pariwisata berperan sebagai motivator dalam hal bagaimana dinas pariwisata memberikan motivasi kepada masyarakat setempat khususnya pengelola objek wisata di dalam mengembangkan objek wisata dengan cara memelihara objek wisata tersebut serta memotivasi masyarakat setempat untuk senantiasa menjaga lingkungan (wawancara 14 Juli 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan kordinasi dengan masyarakat setempat dalam hal pengembangan pantai tanjung bayang.

Wawancara dengan Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) yang mengatakan bahwa motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan AR selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang tanjung bayang dari dulu memang kita dikelola oleh masyarakat disini adapun keterlibatan dinas pariwisata itu baru beberapa tahun kemarin tapi beberapa bulan kemarin pak kadis sempat turun jalan-jalan, alhamdulillah ya kita sudah dijanji untuk dibenahi paling tidak diberi bantuan tetapi belum ada sampai sekarang (wawancara 25 Juni 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas pariwisata belum terlalu maksimal terhadap pantai tanjung bayang.

Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) yang mengatakan bahwa motivator adalah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang bisa memberikan masukan kepada orang lain.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan MJ selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata itu mempunyai peran penting dalam pengembangan kepariwisataan khususnya di Makassar, karena dinas pariwisata adalah salah satu yang menaungi atau membina kepariwisataan itu sendiri, secara khusus kota makassar merupakan alternatif persinggahan sehingga mau tidak mau peran dinas pariwisata itu sangat penting disini untuk mengimbangi tempat pariwisata (wawancara 27 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas pariwisata sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar.

Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan Permana dalam Maulana et al (2015) yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik (dari luar) motivasi ekstrinsik muncul dari diri seseorang, mendorong untuk

menciptakan semangat dan untuk mengubah semua sikap menjadi lebih baik dan motivasi intrinsik (seseorang/kelompok) motivasi intrinsik adalah yang ada dalam diri sendiri lalu mempengaruhi orang lain untuk menjadi yang bermanfaat.

2. Fasilitator

Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menyediakan segala fasilitas yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan S selaku Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Selain sebagai regulator dinas pariwisata itu berfungsi sebagai fasilitator, fasilitator disini bagaimana memfasilitasi teman-teman di area wisata Tanjung Bayang untuk mendapatkan beberapa bantuan dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata salah satu langkahnya bagaimana kita memberikan mereka fasilitas untuk mendapatkan csr (corporate social responsibility) yang dimana bantuan dari pusat perusahaan dan dana yang dari perusahaan swasta untuk membantu masyarakat sekitar tetapi melalui dinas pariwisata dengan itu kami harapkan dialihkan untuk pengembangan daya tarik wisata, maka dari itu respon yang kami lakukan nanti akan mencari csr yang cocok, apakah untuk penambahan gazebo disana atau penambahan tempat-tempat sampah atau mungkin juga bisa dibuatkan panggung seni tergantung nanti kemampuan pihak swasta seperti apa (wawancara 17 juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sebagai fasilitator membantu teman-teman yang berada di Pantai Tanjung Bayang untuk mendapatkan csr yang cocok, agar kemudian dapat menambah sebagian keperluan seperti gazebo, tempat sampah, atau keperluan lainnya.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019), bahwa fasilitator adalah pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala kebutuhan yang mendukung.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan KA selaku Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Selama ini dinas pariwisata itu berperan sebagai fasilitator pantai tanjung bayang memberikan fasilitas berupa bantuan secara tidak langsung seperti csr (corporate social responsibility) itu berupa dana hiba yang bisa membantu pengelola objek wisata untuk bisa mengembangkan objek wisatanya (wawancara 14 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sebagai fasilitator memberikan fasilitas bantuan berupa csr dalam pengembangan objek wisata tersebut.

Wawancara dengan Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori Osborn dan Gaebler dalam buku Amin (2019) mengemukakan bahwa peran pemerintah daerah lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan AR selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang belum ada semacam bantuan yang diterima hanya sekedar kordinasi saja (wawancara 25 Juni 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata hanya berkordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat, tetapi belum datang memberikan bantuan.

Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang kurang relevan dengan Kusno dalam Hadiutomo (2021) mengemukakan bahwa sebagai fasilitator pemerintah berperan agar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang berjalan mampu mendayagunakan seluruh potensi nasional.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan MJ selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata itu sebenarnya sangat berperan akan tetapi untuk khusus tanjung bayang ini kita masih mengharapkan dari dinas tersebut agar bisa membina di tanjung bayang ini, dari segi pembinaan yang kita maksud adalah penataan pantai, penataan gazebo, dan manajemen pengelola dari tanjung bayang ini, itu yang sangat kita harapkan dari dinas pariwisata akan tetapi sampai sekarang hal-hal yang demikian itu belum kita temukan dari dinas pariwisata tersebut (wawancara 27 Juni 2020)”

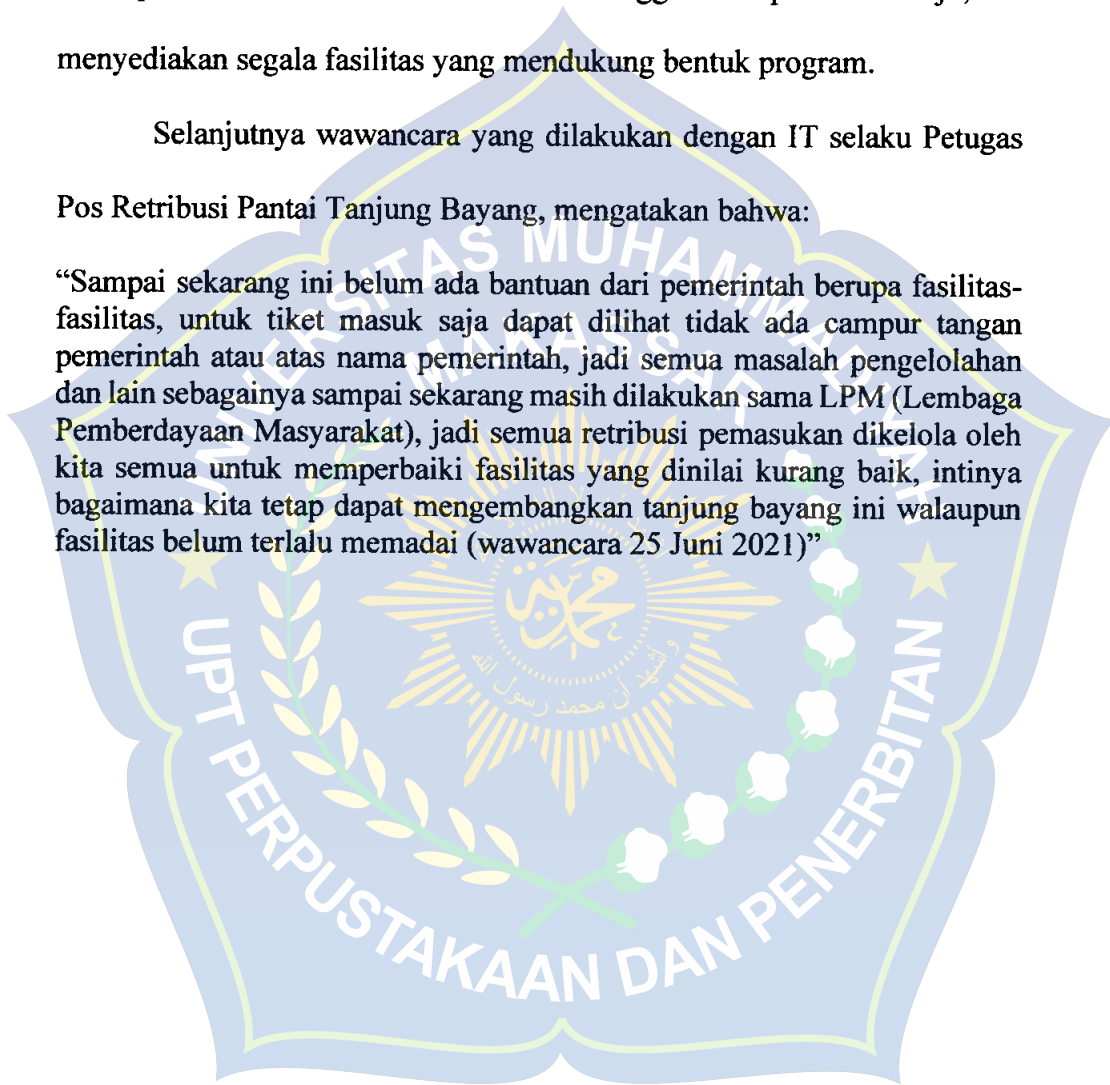
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tanjung bayang sangat mengharapkan bantuan dari dinas pariwisata untuk membina tanjung bayang, tetapi sampai saat ini belum adanya kerja sama yang baik.

Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Welembuntu Herman (2021) yang

mengemukakan bahwa fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju, dan menyediakan segala fasilitas yang mendukung bentuk program.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan IT selaku Petugas Pos Retribusi Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Sampai sekarang ini belum ada bantuan dari pemerintah berupa fasilitas-fasilitas, untuk tiket masuk saja dapat dilihat tidak ada campur tangan pemerintah atau atas nama pemerintah, jadi semua masalah pengelolaan dan lain sebagainya sampai sekarang masih dilakukan sama LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), jadi semua retribusi pemasukan dikelola oleh kita semua untuk memperbaiki fasilitas yang dinilai kurang baik, intinya bagaimana kita tetap dapat mengembangkan tanjung bayang ini walaupun fasilitas belum terlalu memadai (wawancara 25 Juni 2021)”



Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanjung bayang murni dikelola oleh LPM dan masyarakat setempat yang berada di tanjung bayang.

Tanggal	Karcis yang Habis			Estimasi Orang		
	Motor	Mobil	BUS	Motor (2Org)	Mobil(7Org)	BUS (30 Org)
Jan-17	17.635	2.879	15	35.270	20.153	450
Feb-17	8.242	1.775	4	16.484	12.425	120
Mar-17	7.910	1.745	8	15.820	12.215	240
Apr-17	9.443	2.401	43	18.886	16.807	1.290
May-17	20.875	4.170	67	41.750	29.190	2.010
Jun-17	714	168	10	1.428	1.176	300
Jul-17	3.968	1.133	6	7.936	7.931	180
Aug-17	9.144	2.332	13	18.288	16.324	390
Sep-17	9.306	2.003	14	18.612	14.021	420
Oct-17	15.876	3.304	30	31.752	23.128	900
Nov-17	8.824	1.868	5	17.648	13.076	150
Dec-17	10.278	2.156	14	20.556	15.092	420
Jan-18	15.601	3.660	18	31.202	25.620	540
Feb-18	6.902	1.643	6	13.804	11.501	180
Mar-18	12.327	2.936	22	24.654	20.552	660
Apr-18	3.027	933	5	6.054	6.531	150
May-18	12.191	1.760	31	24.382	12.320	930
Jun-18	5.976	848	27	11.952	5.936	810
Jul-18	7.404	2.484	15	14.808	17.388	450
Aug-18	8.676	2.644	15	17.352	18.508	450
Sep-18	8.770	2.724	15	17.540	19.068	450
Oct-18	11.639	2.783	14	23.278	19.481	420
Nov-18	11.436	2.654	9	22.872	18.578	270
Dec-18	13.343	3.391	22	26.686	23.737	660
Jan-19	10.987	2.765	9	21.974	19.355	270
Feb-19	8.562	1.379	4	17.124	9.653	120
Mar-19	9.625	1.764	10	19.250	12.348	300
Apr-19	19.530	3.520	72	39.060	24.640	2.160
May-19	1.375	952	23	2.750	6.664	690
Jun-19	9.235	1.874	35	18.470	6.118	1.050
Jul-19	5.737	1.178	2	11.474	8.246	60
Aug-19	1.054	1.926	10	2.108	13.482	300
Sep-19	1.239	2.065	13	2.478	14.455	390
Oct-19	12.479	2.896	17	24.958	20.272	510
Nov-19	12.873	3.071	16	25.746	21.497	480
Dec-19	13.985	3.682	21	27.970	25.774	630

Sumber Data Pemasukan Tanjung Bayang

Wawancara dengan Petugas Pos Retribusi Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap pembangunan destinasi wisata haruslah berlandaskan pada pendekatan pertumbuhan

ekonomi masyarakat, maka tidak ada jalan lain untuk mencapai tujuan itu selain membangun industri pariwisata yang melibatkan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan DT selaku Petugas Pos Keamanan Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Kami juga kurang tau apa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, karena sejauh ini semua dikelola sama masyarakat sekitar saja, jadi sudah dibagi tugasnya masing-masing ada yang jaga di tanjung bayang bagian depan dan belakang, semua sudah bagi tugasnya. Kalau untuk fasilitas ya masih begini saja yang seadanya, karena yang kelola juga cuman masyarakat (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mengelola tanjung bayang hanya masyarakat dan LPM.

Wawancara dengan Petugas Pos Keamanan Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Welembuntu Herman (2021) yang mengemukakan bahwa fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju, dan menyediakan segala fasilitas yang mendukung bentuk program.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Wisatawan Pantai Tanjung Bayang NA, mengatakan bahwa:

“Menurut saya dinas pariwisata belum terlalu optimal terhadap pengembangan pantai tanjung bayang dilihat dari fasilitas yang ada di pantai tanjung bayang begitu belum memadai (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas pariwisata belum terlalu optimal karena fasilitas di pantai tersebut belum memadai.

Wawancara dengan Wisatawan Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019), bahwa fasilitator adalah pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Wisatawan Pantai Tanjung Bayang AF, mengatakan bahwa:

“Perlunya perhatian pemerintah supaya pantai tanjung bayang lebih baik lagi dan lebih menarik agar lebih banyak lagi pengunjung yang datang, karena sekiranya kalau fasilitas dari pemerintah sudah cukup pasti lebih bagus lagi karena pemerintah tidak menyediakan dan memfasilitasi, tempat sampah saja tidak ada disediakan (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap pantai tanjung bayang agar lebih terawat lagi sehingga bisa menambah pengunjung yang datang.

Wawancara dengan Wisatawan Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Osborn dan Gaebler dalam buku (Amin, 2019) mengemukakan bahwa peran pemerintah daerah lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah.

3. Dinamisator

Dinamisator, agar berlangsungnya pengembangan tempat wisata yang ideal maka pemerintah dan masyarakat diharapkan bekerja sama. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Dalam wawancara yang dilakukan dengan S selaku Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Ketika kami membentuk kelompok wisata di tanjung bayang secara otomatis sudah ada kolaborasi antar pemerintah dengan masyarakat setempat jadi segala bentuk kebijakan pemerintah apalagi pada saat pandemi itu kami selalu kordinasikan, komunikasikan langsung dengan masyarakat disana contoh bagaimana kami kemudian berkolaborasi menjaga supaya pengunjung yang datang di tanjung bayang bisa menerapkan protokol kesehatan salah satunya jadi dinas pariwisata bersama kelompok wisata disana menjaga wilayah tersebut dengan membatasi kunjungan disana sambil tetap menghimbau agar pengunjung disana menjaga protokol kesehatan yang ketat, kami dengan kelompok wisata yang berada di tanjung bayang membuat penyusunan *master plan* (rencana utama) pengembangan disana, ini sangat penting karena bagaimanapun pembangunan pariwisata itu harus terarah jadi jangan sembarangan oleh karena itu dengan berkolaborasi dengan masyarakat disana kami mencoba untuk membuat perencanaan bagaimana kemudian tanjung bayang itu menjadi lebih optimal. Bagaimanapun tanjung bayang memiliki potensi sangat besar pantainya bagus meskipun tidak berpasir putih tapi kalau kita lihat banyak warga lokal yang menikmati mulai pagi hingga senja disana yang perlu ditingkatkan disana model pengelolaannya dan penataan fasilitas pariwisata disana. (wawancara 17 juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata sangat berupaya untuk bekerja sama dengan masyarakat di daerah wisata tersebut.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori Menurut Suparjan dalam buku O. R. Dewi (2018) peran pemerintah sebagai dinamisor adalah memobilisasi sumber daya dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan KA selaku Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Sejauh pemahaman saya peran dinas pariwisata selaku dinamisor itu, melibatkan beberapa unsur-unsur yang terkait di dalam mengembangkan objek wisata seperti melibatkan pemerintah dimana yaitu dinas pariwisata itu sendiri, tokoh masyarakat, kelompok sadar wisata, perusahaan.” (wawancara 14 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai dinas pariwisata itu sendiri telah melibatkan masyarakat, kelompok sadar wisata dan perusahaan untuk bekerja sama.

Wawancara dengan Staff/Pelaksana Dinas Pariwisata tersebut menunjukkan hasil yang relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) mengemukakan bahwa dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan AR selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Harusnya kawasan ini harus betul-betul diperhatikan karena ini salah satu objek wisata yang ada di kota makassar ini yang sangat strategis apalagi berbicara pantai jadi kalau kita lihat di makassar itu cuman tanjung bayang yang tersisa wilayah pantai yang bisa dibilang masih terjaga dan terawat

yang ditempati masyarakat untuk rekreasi karena pantai losari sudah tidak bisa mandi-mandi tinggal tanjung bayang ini, sudah dari kemarin-kemarin sebenarnya masyarakat maunya seperti itu cuman namanya yah pemerintah juga tidak bisa kita paksakan seperti maunya kita, jadi sudah beberapa puluh tahun ini yang kami kembangkan itu hasil dari retribusi masuk itu sendiri, bikin jalan apa segala macam (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sangat diharapkan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan lagi pantai tanjung bayang, karena selama ini murni hanya dari masyarakat yang mengelola objek wisata tersebut.

Wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan Kusno dalam buku Hadiutomo (2021) mengemukakan bahwa sebagai dinamisator, pemerintah berperan menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif dan dinamis agar seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam program dan kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan MJ selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata itu tidak pernah mengadakan kerja sama dengan masyarakat yang ada dikelola disini pengelolaan murni dari masyarakat itu sendiri, mengapa kita katakan demikian karena sampai sekarang tahun 2021 kerja sama antara dinas pariwisata kepada masyarakat itu minim, kita sangat mengharapkan kerja antar dinas pariwisata apakah dalam bentuk pengelolaan atau manajemen dari pengelolaan dari gazebo atau villa tersebut karena masyarakat ini murni dari pengetahuannya sendiri atau sumber daya manusianya sendiri jadi tentunya ketika ada bantuan atau masukan-masukan dinas pariwisata untuk membangun kawasan pariwisata tanjung bayang ini maka kita terbuka tetapi dengan catatan bahwasanya

pengelolaan itu murni dari masyarakat itu sendiri karena jangan sampai mereka yang ingin kelola lalu mereka yang akan menikmati hasilnya sendiri karena sebenarnya itu yang masyarakat tidak inginkan, karena masyarakat yang memiliki lahan, pondokan, gazebo dan lainnya (wawancara 27 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa selama ini pantai tanjung bayang pengelolaannya murni dari masyarakat setempat itu sendiri.

Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pantai Tanjung Bayang tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) mengemukakan bahwa dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan IT selaku Petugas Pos Retribusi Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Tidak ada dukungan seperti itu. Kalau ada perubahan biasa dari ide masyarakat atau pengurus LPM saja, kalau bisa dilakukan kami lakukan, kalau sekarang belum ada kerja sama dengan pihak lain (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pantai tanjung bayang berkembang karena dari ide masyarakat itu sendiri, tidak ada campur tangan orang lain.

Wawancara dengan Petugas Pos Retribusi tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan Kusno dalam buku Hadiutomo (2021) mengemukakan bahwa sebagai dinamisator, pemerintah berperan

menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif dan dinamis agar seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam program dan kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan DT selaku Petugas Pos Keamanan Pantai Tanjung Bayang, mengatakan bahwa:

“Semua kami kembangkan apa yang bisa dikembangkan supaya bisa menarik masyarakat untuk datang berkunjung, ada yang buat konsepnya seperti pantai di Bali dan sebagainya, jadi yang seperti itu yang kami kembangkan (wawancara 25 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini semua pengelolaan pantai Tanjung Bayang tidak ada sentuhan dari pemerintah.

Wawancara dengan Petugas Pos Keamanan tersebut menunjukkan hasil yang tidak relevan dengan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengembangan pariwisata sangat penting dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, maka dari itu diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan tempat-tempat wisata yang berada di Kota Makassar terlebih tempat wisata pantai karena yang paling banyak digemari oleh wisatawan. Adapun dalam pasal 23 ayat 1c telah memaparkan dengan jelas bahwa

kewajiban pemerintah adalah “memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali”.

Kota Makassar memiliki banyak wisata pantai yang menarik untuk dikunjungi untuk berlibur, tetapi yang menjadi perhatian yaitu Pantai Tanjung Bayang, berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis melihat kurangnya sentuhan dari pemerintah dari segi penataan dan penyediaan prasarana di Pantai Tanjung Bayang.

Untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar penulis menggunakan teori Pitana dan Gayatri dalam Hartono et al (2019) yaitu motivator, fasilitator, dinamisator.

1. Motivator

Pentingnya peran dinas pariwisata sebagai motivator dalam pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar dan perlu dipahami oleh dinas pariwisata dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan seperti sosialisasi sehingga memotivasi warga setempat untuk membantu dalam penataan dan pelestarian di Pantai Tanjung Bayang karena peran dinas pariwisata sebagai motivator dalam pengembangan Pantai Tanjung Bayang dianggap belum maksimal.

2. Fasilitator

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator sangat penting dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang berada di objek wisata tersebut. Pemerintah merupakan pendukung dalam pengembangan objek wisata tetapi peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dianggap belum

optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dan wawancara yang diperoleh.

3. Dinamisator

Peran Dinas Pariwisata sebagai dinamisator dinilai belum optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal mengembangkan wisata Pantai Tanjung Bayang di Kota Makassar.

Kurangnya bantuan terhadap pengembangan objek wisata pantai tersebut mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana, sehingga dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah ataupun swasta kiranya dapat membantu dalam hal penganggaran sarana dan prasarana untuk kemajuan objek wisata Pantai Tanjung Bayang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pantai Tanjung Bayang belum efektif, pengelola tanjung bayang sangat berharap pemerintah segera mengambil peran dalam hal pengembangan wisata pantai tanjung bayang. Pemerintah sebagai motivator belum optimal karena dalam kenyataannya belum ada peran dari Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk memotivasi masyarakat setempat atau pelaku usaha yang berada di objek wisata tersebut untuk menjaga lingkungan serta berperan aktif dalam pelestarian Pantai Tanjung Bayang. Peran pemerintah sebagai fasilitator belum berjalan secara maksimal dan optimal karena penyediaan sarana dan prasarananya belum memadai, dinas pariwisata hanya berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan hanya menjanjikan akan membantu memfasilitasi segala kekurangan yang ada di pantai tanjung bayang akan tetapi sampai saat ini belum ada bantuan, dan pemerintah sebagai dinamisor segala pengembangan pariwisata di pantai tanjung bayang murni dari LPM dan bekerja sama dengan masyarakat akan tetapi belum terealisasikan dengan baik sehingga belum mampu mengembangkan objek wisata secara maksimal dan optimal dan dari para pelaku objek wisata atau destinasi wisata yang masih rendah dalam melayani pengunjung.

B. Saran

1. Dinas Pariwisata Kota Makassar

- a. Membuat kegiatan sosialisasi mengenai bagaimana cara pelestarian pantai tanjung bayang dan tata cara pengolahan yang baik dan benar terhadap warga setempat dan pengunjung .
- b. Lebih memperhatikan anggaran yang sudah ditetapkan terutama untuk bagian pariwisata agar dapat menambah fasilitas yang ada di suatu objek pariwisata seperti kamar ganti, sarana kebersihan untuk bersantai dan kebutuhan lainnya, khususnya di pantai tanjung bayang.
- c. Menciptakan pusat pembelanjaan oleh-oleh khas makassar di dalam pantai tanjung bayang.

2. LPM Tanjung Bayang

- a. Membentuk komunitas-komunitas usaha mikro menengah dengan memanfaatkan hasil-hasil laut yang ada di pantai tanjung bayang.
- b. Memperhatikan perawatan, pertumbuhan penginapan dan tingkat pertumbuhan pengunjung, agar memudahkan wisatawan untuk menemukan penginapan disaat harus bermalam di pantai tanjung bayang.
- c. Mengajak warga setempat untuk menciptakan dan memperbaharui tema-tema serta objek-objek untuk menambah daya tarik wisatawan.

3. Wisatawan

- a. Lebih menjaga kebersihan di dalam pantai tanjung bayang dengan tidak membuang sampah sembarangan .

- b. Menciptakan suasana yang kondusif demi mewujudkan wisata yang nyaman bagi siapapun dengan menjaga perdamaian, menjaga keutuhan agar tidak memicu terjadinya kerusakan dan pertengkaran di kawasan pantai tanjung bayang.
- c. Lebih mentaati peraturan yang telah ada.

